



Kebijakan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar

Kristoforus Dowa Bili¹, Ida Bagus Putu Arnyana², Nyoman Dantes³

¹Universitas Katolik Weetebula, ^{2,3}Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

E-mail: kristo.stkipsweet@gmail.com, putu.arnyana@undiksha.ac.id, dantes@undiksha.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-08-12 Revised: 2023-09-15 Published: 2023-10-01	<p>This study aims to describe education policies at the elementary school level and the problems that accompany the policies in one of the elementary schools, namely SDN Wee Tabula II. The research subjects were the principal and teachers of SDN Wee Tabula II. The type of research used is descriptive qualitative by using interview and observation methods. Based on the study, various information was obtained about education policies at the elementary school level, especially at SDN Wee Tabula II, District Tambolaka City, Southwest Sumba, East Nusa Tenggara. These elementary school level education policies, namely: 1. Collaborating with innovation, 2. Conducting training on the use of ICT media in classroom learning, 3. Training on implementation of the independent curriculum, 4. Joint gymnastics, 5. Literacy class competition, 6. Teacher teaching competition according to the mapping of ability level categories of early grade students, 7. Celebrate the Republic of Indonesia Anniversary by holding a quiz competition, poetry reading competition. Apart from that, there are also problems in education policy at the elementary school level, namely: Teachers have different characteristics (individuals and environment); The types of basic education development micro-policy programs carried out by school principals and teachers are still very limited; Lack of readiness and commitment of teachers in participating in activities as micro policies; Lack of teacher motivation and awareness in carrying out micropolicies; Limited level of ability of school leaders and teachers to reach superior programs that can be used as micro policies; Limited ability to build communication and coordination with other parties who might be able to assist the implementation of educational activity programs at the micro level.</p>
Keywords: <i>Education Policy;</i> <i>Elementary School.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-08-12 Direvisi: 2023-09-15 Dipublikasi: 2023-10-01	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pendidikan tingkat sekolah dasar dan permasalahan yang menyertai kebijakan pada salah satu sekolah dasar, yaitu SDN Wee Tabula II. Subyek penelitian adalah kepala sekolah dan guru SDN Wee Tabula II. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Berdasarkan kajian diperoleh berbagai informasi tentang kebijakan pendidikan tingkat sekolah dasar, khususnya di SDN Wee Tabula II, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebijakan-kebijakan pendidikan tingkat sekolah dasar tersebut, yaitu: 1. Menjalani kerjasama dengan inovasi, 2. Melaksanakan pelatihan penggunaan media ICT dalam pembelajaran di kelas, 3. Pelatihan implementasi kurikulum merdeka, 4. Senam bersama, 5. Lomba kelas literat, 6. Lomba guru mengajar sesuai pemetaan kategori level kemampuan siswa kelas awal, 7. Memeriahkan HUT RI dengan melaksanakan lomba cerdas cermat, lomba baca puisi. Selain itu, terdapat pula masalah dalam kebijakan pendidikan tingkat sekolah dasar, yaitu: Guru memiliki karakteristik yang berbeda (individu dan lingkungan); Jenis program kebijakan mikro pembangunan pendidikan dasar yang dilakukan oleh kepala sekolah dan para guru masih sangat terbatas; Kurangnya kesiapan dan komitmen guru dalam mengikuti kegiatan sebagai kebijakan mikro; Kurangnya motivasi dan kesadaran guru dalam menjalankan kebijakan mikro; Terbatasnya level kemampuan pimpinan sekolah dan para guru untuk menjangkau program-program unggul yang dapat dijadikan sebagai kebijakan mikro; Terbatasnya kemampuan membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang mungkin dapat membantu pelaksanaan program kegiatan pendidikan pada level mikro.</p>
Kata kunci: <i>Kebijakan Pendidikan;</i> <i>Sekolah Dasar.</i>	

I. PENDAHULUAN

Salah satu anamat pembukaan UUD 1945 melalui alinea ke-4 sangat jelas, yaitu mencerdas-

kan kehidupan bangsa. Pesan amat filosofis menjadi fondasi yang baik bagi arah pembangunan Sumber Daya Manusia/SDM Indonesia. Oleh

karena itu, semua manusia yang lahir di atas pertiwi Nusantara ini, wajib dicerdaskan. Jalur paling tepat yang diwadahi oleh negara adalah melalui pendidikan yang disebut oleh K.H. Dewantara sebagai Tri Pusat Pendidikan, yaitu pendidikan informal di keluarga, pendidikan formal di sekolah dari jenjang taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal, yaitu berbagai kursus dan pendidikan latihan (diklat) yang dapat membantu bagi upaya pengembangan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan siswa. Pada level kebijakan pembangunan pendidikan, terdapat 3 bagian yang saling terkait secara hirarki, yaitu kebijakan makro pendidikan, kebijakan meso pendidikan, dan kebijakan mikro.

Ketiga hal di atas berada tingkatan dan kewenangan masing-masing. Kebijakan makro pendidikan berada dan menjadi kewenangan pemerintah pusat, kementerian pendidikan; kebijakan meso berada dan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dinas pendidikan pada tingkat provinsi dan kabupaten; sedangkan kebijakan mikro berada dan menjadi kewenangan satuan pendidikan, yaitu kepada sekolah dan guruguru di sekolah. Dari ketiga level kebijakan pembangunan pendidikan di atas, penulis mengkaji kebijakan pendidikan dasar, khususnya pada tingkat sekolah dasar sekaligus menyajikan berbagai permasalahan yang menyertai kebijakan pendidikan tingkat sekolah dasar tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Sebelum melaksanakan penelitian ini, peneliti menyiapkan berbagai instrument penelitian yang digunakan, yaitu berupa instrument wawancara, instrumen pengamatan, dan juga dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan pada SDN Weetabula II, Kecamatan Kota, Kabupatens Sumba Barat Daula, NTT. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah dan para guru SDN Wee Tabula II, yang berjumlah 22 orang. Data dianalisis melalui 3 tahapan, yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pendidikan SD

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*offline*), kata kebijakan merupakan kata benda yang berarti 1) Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; 2) rangkaian konsep dan asas

yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, oragniasasi, dan sebagainya). Pengertian leksikal di atas jelas menunjukkan bahwa kebijakan diartikan sebagai kebijaksanaan. Namun, sumber lain juga seperti menyebutkan adanya perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Abidin mengatakan "Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan didefinisikan sebagai 1) Undang-undang, 2) Peraturan Pemerintah, 3) Keputusan Presiden, 4) Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, 5) Keputusan Bupati, 7) Keputusan Direktur, dan lainnya, Lebih lanjut dikatakan, demikian juga kebijakan itu memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkupnya dapat bersifat makro, meso, dan mikro, (Arwildayanto, dkk. 2018: 3).

Pemaknaan lain diperoleh bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pada pengertian kebijakan kedua berdasarkan leksikal ini diperoleh arah pemahaman yang benar dan jelas di mana kebijakan merupakan sejumlah konsep dan asas yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Mahardani, A.J. mengatakan bahwa "Sebagai konsep filosofis, kebijakan dipandang sebagai seperangkat prinsip atau kondisi yang diinginkan. Kebijakan sebagai produk didefinisikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Dengan sebagai sebuah proses, kebijakan berarti bagaimana sebuah organisasi mengetahui apa yang diharapkan darinya, program dan mekanisme untuk mencapai produknya dan kebijakan sebagai sebuah kerangka kerja. Kebijakan adalah proses negosiasi untuk merumuskan masalah dan metode implementasinya", (Jainurakhma, 2023: 11). Dari paparnya, Mahardani menyebutkan kebijakan dalam empat konteks, yaitu sebagai konsep filosofi, sebagai produk, sebagai proses, dan kebijakan sebagai suatu kerangka kerja. Dengan demikian, kebijakan adalah serangkaian rencana organisatoris untuk direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi keberhasilannya.

Pada tingkat sekolah, kebijakan sering disebut sebagai kebijakan mikro. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Offline*), kata

mikro diartikan sebagai kecil; tipis; sempit. Dengan demikian mikro merupakan lawan kata dari *macro*/makro yang berarti besar. Dengan demikian, kebijakan *micro*/mikro berarti seperangkan ide yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam suatu organisasi. Dalam dunia pendidikan, terdapat tiga tingkatan kebijakan, yaitu 1) kebijakan tingkat *macro*/makro, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh negeri dalam hal ini pemerintah (baik oleh menteri pendidikan, presiden yang setuju oleh para anggota legislatif; 2) kebijakan tingkat meso, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah tingkat kabupaten, termasuk di dalam kebijakan yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten sebagai perpanjangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Tentu, kebijakan pendidikan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten melewati proses kajian dan persetujuan anggota legislatif tingkat provinsi dan kabupaten. 3) kebijakan pendidikan tingkat *micro*/mikro, yaitu kebijakan pendidikan yang diambil pada tingkat satuan pendidikan oleh kepala sekolah di sekolah dan para guru di kelas.

Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan pada tingkat sekolah atau mikro merupakan kristalisasi kebijakan pendidikan tingkat *macro* (pusat) dan meso (daerah) dalam alur gagasan yang sama melalui amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terkait tiga level pembangunan pendidikan di atas, Junaid H. (2012: 84) mengatakan bahwa "Sasaran pendidikan secara makro sebagaimana yang terdapat dalam lembaga-lembaga pendidikan dapat diklasifikasi pada beberapa hal, antara lain akuisisi pengetahuan (sasaran kognitif), pengembangan keterampilan atau kemampuan (sasaran psikomotorik) dan pembentukan sikap (sasaran afektif), sasaran makro ini kemudian diterjemahkan kedalam berbagai bentuk sasaran mikro yang diukur secara terperinci dan spesifik berupa apa yang diharapkan dari hasil belajar mengajar. Salah satu sasaran yang dapat diukur untuk sasaran kognitif adalah nilai hasil belajar dan perengkingan sebagai implikasi dari hasil belajar. Sasaran psikomotorik terkait dengan apa yang telah dihasilkan oleh peserta didik, sedang untuk sasaran afektif, terkait dengan

perubahan sikap/prilaku peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar."

Dengan demikian, kebijakan Pendidikan tingkat sekolah dasar atau yang disebut kebijakan mikro berkaitan erat dengan seperangkat ide dan gagasan yang dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi pada tingkat satuan pendidikan dasar yang terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah.

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data hasil penelitian melalui wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pada tingkat sekolah dasar dilakukan berbagai kebijakan mikro. Hal ini ditempuh oleh kepala sekolah dan para guru sesuai dengan kebutuhan riil dengan mempertimbangkan karakteristik siswa dan sekolah. Berikut ini adalah hasil penelitian melalui wawancara dengan kepala sekolah dan para guru SD Wee Tabula II. SDN Wee Tabula II merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT yang terletak di pusat kota kecamatan. Selain sekolah ini sebagai sekolah penggerak, terdapat satu guru yang juga telah lolos sebagai guru penggerak. Selanjutnya, informasi terkait kebijakan pendidikan pada level mikro diperoleh dari kepala sekolah dan guru penggerak tersebut. Informasi terkait kajian melalui wawancara terbatas di atas diperoleh pada Rabu, 12 April 2023. Kepala sekolah dan seorang guru penggerak di sekolah tersebut memberikan gambaran tentang sejumlah kebijakan yang penting untuk diambil dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Kepala sekolah memberikan informasi bahwa berbagai kebijakan sekolah yang diambil, diawali dengan pertemuan dengan para guru. Para guru akan memberikan berbagai informasi tentang kebutuhan profesional guru yang ingin dikembangkan dan untuk selanjutnya dicarikan solusi pelaksanaannya. Berikut adalah sejumlah kegiatan yang dilaksanakan di SDN Wee Tabula II sebagai kebijakan mikro pembangunan sekolah dasar:

Pertama, menjalin kerjasama dengan inovasi; kegiatan kerjasama ditempuh oleh kepala sekolah bersama para guru untuk mendapatkan bantuan buku kelas awal melalui Inovasi yang merupakan tim perpanjangan tangan kementerian pendidikan dan juga kebudayaan yang sedang memberi perhatian khusus bagi kompetensi siswa kelas awal. Melalui tim inovasi, SDN Wee Tabula II

mendapatkan bantuan buku-buku berjenjang untuk digunakan bagi upaya peningkatan literasi dasar siswa-siswi di sekolah tersebut.

Kedua, melaksanakan pelatihan penggunaan media ICT dalam pembelajaran di kelas; salah satu masalah urgen yang dihadapi para guru saat ini adalah rendahnya kemampuan melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sementara pada sisi yang lain, perkembangan teknologi telah merambah keberbagai pelosok hingga anak-anak lebih cenderung bahkan akrab dengan dunia adroid. Ketiga tiba di sekolah, pembelajaran belum berbasis IT, maka tentu membosankan bagi anak. Menyadari pentingnya penggunaan media TIK dalam pembelajaran maka melalui pertemuan/rapat guru disepakati untuk melaksanakan pelatihan penggunaan TIK dalam pembelajaran dengan narasumber adalah guru penggerak berkolaborasi dengan dosen salah satu perguruan tinggi di kabupaten tersebut.

Ketiga, pelatihan implementasi kurikulum merdeka; pelatihan implementasi kurikulum merdeka sangat diperlukan oleh para guru agar memiliki pemahaman yang benar untuk Langkah tindak lanjut. Oleh karena itu, kepala sekolah bersama guru bersepakat untuk mengundang narasumber melaksanakan pelatihan tentang implementasi kurikulum merdeka.

Keempat, senam bersama; salah satu kegiatan wajib yang mejadi kebijakan pada level sekolah adalah senam bersama yang dilaksanakan pada setiap Jumad pagi. Dengan demikian, kegiatan rutin dilaksanakan pada setiap minggu dengan terlebih dahulu menugaskan salah satu guru untuk memberikan Latihan senam kepada para siswa hingga para siswa mahir.

Kelima, lomba kelas literat; kebijakan lainnya adalah pelaksanaan lomba kelas literat. Kegiatan ini diawali dengan kesepakatan bersama para guru terutama guru kelas awal untuk melaksanakan lomba kelas literat. Selanjutnya, para guru kelas awal difasilitasi untuk mendesaik kelas dengan berbagai pajangan berkaitan dengan literasi dan numerasi.

Keenam, lomba guru mengajar sesuai pemetaan kategori level kemampuan siswa kelas awal; kegiatan lomba lain yang dilaksanakan sebagai kebijakan mikro sekolah dasar adalah pelaksanaan lomba guru mengajar sesuai pemetaan level kemampuan

siswa kelas awal. Kegiatan ini terlebih dahulu dilakukan dengan memetakan kemampuan awal siswa mulai dari yang hanya bisa eja huru, suku kata, kata, dan kemudian kalimat sederhana. Kemudian, para guru kelas awal membantu siswa sesuai dengan level kompetensi yang dimiliki.

Ketujuh, memeriahkan HUT RI dengan melaksanakan lomba cerdas cermat, lomba baca puisi; salah satu kebijakan sekolah yang tak kalah pentingnya adalah lomba memperingati HUT RI. Pada perayaan HUT RI ini berbagai lomba dilaksanakan, yaitu lomba cerdas cermat, lomba baca puisi dan berbagai lomba lainnya yang disepakati oleh guru untuk dilaksanakan.

Temuan melalui wawancara dan observasi di atas didukung dengan hasil kajian sebelumnya yang menyimpulkan tentang kebijakan pendidikan mikro pada salah satu sekolah dasar, yaitu MI Al-Huda, Depok Sleman, DIY. Beberapa kebijakan pendidikan tingkat sekolah dasar/mikro yang dilaksanakan adalah: 1. Diklat, 2. Diskusi Ilmiah, 3. Supervisi, 4. Melek IT, 5. Honorarium, 6. Mengikuti KKG, 7. Penerimaan guru, 8. Pembinaan Kemenag, dan 9. Menjalani Motivator (Hudalloh, M., 2019: 4).

Kebijakan-kebijakan pendidikan tingkat sekolah di atas tidak berjalan optimal sesuai ekpektasi pimpinan sekolah. Terdapat juga sejumlah permasalahan yang menyertai pengambilan kebijakan tingkat sekolah tersebut. Permasalah yang dimaksud antara lain: 1) guru memiliki karakteristik yang berbeda (individu dan lingkungan); 2) jenis program kebijakan mikro pembangunan pendidikan dasar yang dilakukan oleh kepala sekolah dan para guru masih sangat terbatas, 3) kurangnya kesiapan dan komitmen guru dalam mengikuti kegiatan sebagai kebijakan mikro, 4) kurangnya motivasi dan kesadaran guru dalam menjalankan kebijakan mikro; 5) terbatasnya level kemampuan pimpinan sekolah dan para guru untuk menjangkau program-program unggul yang dapat dijadikan sebagai kebijakan mikro; 6) terbatasnya kemampuan membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang mungkin dapat membantu pelaksanaan program kegiatan pendidikan pada level mikro. Keenam hal ini juga dapat menjadi masalah tersendiri dalam upaya pengambilan kebijakan mikro pembangunan pendidikan dasar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kebijakan pendidikan tingkat sekolah dasar yang ditempuh oleh kepada sekolah dan para guru, antara lain: 1. Menjalinkan kerjasama dengan inovasi, 2. Melaksanakan pelatihan penggunaan media ICT dalam pembelajaran di kelas, 3. Pelatihan implementasi kurikulum merdeka, 4. Senam bersama, 5. Lomba kelas literat, 6. Lomba guru mengajar sesuai pemetaan kategori level kemampuan siswa kelas awal, 7. Memeriahkan HUT RI dengan melaksanakan lomba cerdas cermat, lomba baca puisi.

Selain itu, terdapat permasalahan dalam praktik pelaksanaan kebijakan pendidikan pada tingkat sekolah dasar, yaitu: Guru memiliki karakteristik yang berbeda (individu dan lingkungan); Jenis program kebijakan mikro pembangunan pendidikan dasar yang dilakukan oleh kepala sekolah dan para guru masih sangat terbatas; Kurangnya kesiapan dan komitmen guru dalam mengikuti kegiatan sebagai kebijakan mikro; Kurangnya motivasi dan kesadaran guru dalam menjalankan kebijakan mikro; Terbatasnya level kemampuan pimpinan sekolah dan para guru untuk menjangkau program-program unggul yang dapat dijadikan sebagai kebijakan mikro; Terbatasnya kemampuan membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang mungkin dapat membantu pelaksanaan program kegiatan pendidikan pada level mikro.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka beberapa saran yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Kepala sekolah dan para guru agar meningkatkan kebijakan pendidikan tingkat sekolah dasar secara inovatif dan kreatif serta menyesuaikan dengan tuntutan kemajuan teknologi.
2. Kepala sekolah dan juga guru terus mengembangkan kompetensi diri melalui pelatihan, seminar, worksop, symposium dan atau studi lanjut untuk memiliki wawasan yang luas dan berkembang sesuai tuntutan zaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Arwildayanto, dkk. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan-Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendikia Press.
- Hudalloh, M., 2019. *Analisis Kebijakan Pengembangan Profesi Guru di MI Al Huda Maguwoharjo, Depok, Sleman*. AS SIBYAN, Jurnal Kajian Kritis Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Dasar VOL 2, NO. 1, Januari Juni 2019, e-ISSN : 2599-2732.
- Jainurakhma, J. 2023. *Manajemen Pendidikan Tinggi Pasca Pandemi*. Bandung: Widina.
- Junaid, H. 2012. *Sumber, Azas dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara Makro dan Mikro Terhadap Rumusan Kebijakan Pendidikan Nasional)*. Sulesana, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2012.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945